



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : 1 /DPR RI/II/2019-2020

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020;
 - b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020;
 - c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari

2020 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 untuk ditetapkan;

d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-8 tanggal 22 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI; Para Ketua Fraksi : FPDI Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FDEMOKRAT, FPKS, FPAN, dan FPPP.
7. Sekretaris Jenderal DPR RI;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;

9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA,



PUAN MAHARANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 /DPR RI/II/2019-2020
 TANGGAL : 22 JANUARI 2020

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR/Komisi II	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH /DPR /Komisi III	<i>Carry Over</i>
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH /DPR /Komisi III	<i>Carry Over</i>
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/ Komisi IV	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/ Komisi IV	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V	

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/ Komisi VI	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/ Komisi VI	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR/ Komisi VII	<i>Carry Over</i>
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/ Komisi VII	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/ Komisi VIII	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/ Komisi VIII	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/ Komisi IX	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/ Komisi IX	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR/Komisi X	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	PEMERINTAH /DPR /Komisi XI	<i>Carry Over</i>
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/ Komisi XI	

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR/Anggota	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR/Anggota	<i>Omnibus Law</i>
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/Anggota	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR/Anggota	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang	DPR/Anggota	

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Sistem Perposan dan Logistik Nasional		
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020
YANG DITETAPKAN OLEH DPR, PEMERINTAH, DAN DPD
UNTUK DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA PADA DPR PERIODE 2019-2024
(CARRY OVER)**

1	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
4	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

KETUA,


PUAN MAHARANI